

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

1. Upaya Menyejahterakan Masyarakat

Bermasyarakat, pada hakekatnya bertujuan untuk menjalani suatu sistem hidup bersama yang akan melahirkan dan menumbuhkan kebudayaan. Dengan berbudaya itu setiap anggota masyarakat merasa dirinya terikat satu sama lain. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan yang saling berinteraksi, saling berintegrasi, saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai, saling mentaati aturan dan peraturan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang serasi. Keserasian atau keharmonisan bermasyarakat (social equilibrium) merupakan keadaan atau kehidupan yang dicita-citakan oleh semua kehidupan bermasyarakat secara universal karena di dalamnya mengandung ketertiban, keteraturan, ketentraman dan menjanjikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan.

Masalah social equilibrium atau kemakmuran masyarakat sangat rentan terhadap gangguan atau kendala yang datangnya dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak dan akan memberikan dampak yang sangat parah terhadap keseimbangan masyarakat itu. Gangguan atau kendala tersebut diantaranya yang berkaitan dengan masalah

kependudukan yang dewasa ini menjadi masalah bagi setiap bangsa dan negara di seluruh dunia karena bukan saja masalah migrasi, laju pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah penduduk saja yang bertambah setiap waktu akan tetapi juga menimbulkan masalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana yang tersedia baginya, atau ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi disatu pihak dengan laju pertumbuhan penduduk dipihak lainnya.

Dampak ketidakseimbangan yang menimbulkan berbagai kendala itu antara lain karena pertumbuhan dan perkembangan kota-kota metropolitan berubah menjadi kota-kota megapolitan dengan cepat disertai penghuninya yang padat. Menurut Sensus Penduduk (2000) "Setiap kilometer persegi di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat dihuni oleh 951 orang" dan kota-kota megapolit itu selain memperlihatkan kemegahan, kemewahan, kegemerlapan tetapi juga memperlihatkan sisi-sisi yang suram seperti keterbatasan lahan untuk pertamanan, penghijauan, tempat bermain kanak-kanak, tempat hiburan, rekreasi, tata-perkotaan yang tidak beraturan, kompleks perumahan yang padat berebut dengan kawasan industri, menjamurnya pedagang kaki lima, polusi suara dan udara, rendahnya derajat dan pelayanan kesehatan, kesulitan untuk memperoleh air bersih dan penerangan, munculnya kantung-kantung kemiskinan dan daerah-daerah kumuh, timbunan sampah berselang dengan tempat

pemukiman para migrasi musiman, tingginya angka pengangguran dan angka kriminalitas, kemacetan lalu lintas di mana-mana dan kota menjadi semerawut, kesemuanya itu menjadi kendala untuk menegakkan disiplin, ketertiban dan hukum.

Telah dimaklumi pula, bahwa tanpa penataan yang baik terhadap hunian dan jumlah penduduk yang pesat ini, akan mengakibatkan sumber energi di darat laut dan udara akan terkuras habis, limbah industri akan menjadi racun bagi tanaman dan hasil tanaman yang dimakan, udara juga akan penuh dengan debu yang beracun yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit kulit, penyakit pernapasan bagi manusia dan hewan, hutan-hutan akan rusak karena penebangan dan penjarahan hasil hutan yang terus menerus, humus hutan sudah tidak lagi dapat menyerap air hujan dan menimbulkan banjir di mana-mana, bahkan gosong dan palung-palung laut dan tepian pantai juga habis terkena abrasi laut, tanah menjadi terkikis dan akhirnya lenyap, pasir, gamping, batu-batuan habis dijadikan komoditi yang menguntungkan sebagai bahan pembangunan kota-kota besar.

Secara langsung atau tidak kepadatan penduduk ini berkontribusi terhadap penambahan (terbesar) dari penduduk dunia yang secara regional berada di negara-negara Afrika, Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang dewasa ini jumlah penduduknya hampir 1/4 penduduk dunia.

Di kawasan ini terdapat negara-negara yang masih belum maju dan belum berkembang. Masalah kepadatan penduduk ini sering kali dikaitkan dengan fertilitas/jumlah anak lahir hidup, sehingga secara mikro keluarga-keluarga miskin mendapat kesulitan untuk mendewasakan anak-anaknya karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan akan makan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan secara makro masyarakat sulit untuk meningkatkan pertumbuhannya karena laju pertumbuhan penduduk lebih cepat datangnya.

Pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang melaju dengan cepat ini tercermin dari contoh berikut :

- a. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2000 telah berjumlah 7.5 miliar jiwa seandainya laju pertumbuhan penduduk dunia itu rata-rata tetap 2,0% setiap tahunnya maka dalam kurun waktu 35 tahun kemudian atau pada tahun 2035 nanti, penduduk dunia jumlahnya akan menjadi dua kali lipat menjadi 15 milyar jiwa, berdasarkan suatu rumus yang disebut " doubling times year 70". Sedangkan luas bumi yang menjadi tempat berpijak dan luas lahan untuk bercocok tanam bagi persediaan pangan 15 milyar jiwa itu sangatlah terbatas, karena luas planet bumi ini hanya 30 % terdiri dari daratan dan sisanya 70% lautan.
- b. Jumlah penduduk Indonesia 206 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 % per tahun (SP 2000), diperkirakan hanya diperlukan

waktu sekitar 35 tahun untuk mencapai jumlah penduduknya menjadi dua kali lipat atau sekitar 412 juta jiwa pada tahun 2035.

- c. Jumlah penduduk propinsi Jawa Barat 35 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,17% per tahun (SP 2000), diperkirakan hanya diperlukan waktu sekitar 30 tahun untuk mencapai jumlah penduduknya menjadi dua kali lipat atau sekitar 70 juta jiwa pada tahun 2031.
- d. Jumlah penduduk kota Bandung 2. 500 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,41 % per tahun (SP 2000), diperkirakan hanya diperlukan waktu sekitar 50 tahun untuk mencapai jumlah penduduknya menjadi dua kali lipat atau sekitar 5 juta jiwa pada tahun 2050.

Masalah kepadatan penduduk ini seperti yang dikemukakan di atas, tidaklah mengherankan apabila pada akhir abad ke-20 Indonesia menempati urutan terdepan dengan jumlah penduduknya yang besar (200 juta), setelah negara Republik Rakyat Cina (1,2 Milyar), India (954 juta), Rusia (400 juta, dan Amerika Serikat (294 Juta). Menghadapi kenyataan ini, para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, yang tergabung dalam kelompok Club of Rome (1970), memperingatkan semua negara di dunia dengan cara menerbitkan buku-buku diantaranya ditulis oleh Hardin. G. (1986) " Population, Evaluation and Birth Control"; Cloud P. (1969) " Resources and Man"; dan Ehrlich P.R. dan Ehrlich A.H. (1970) "Population, Resources, Environment/Issues in human ecology" dan "Population Bomb" (1978) oleh penulis yang sama. Disamping itu berbagai

lembaga penelitian kependudukan di dunia telah menerbitkan pula sederetan laporan-laporan penelitian, seminar, dan lain-lain baik yang ditulis oleh penulis dari dunia Barat maupun dari dunia Timur yang ditunjang oleh Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau united Nation For Population Activities (UNFPA), di New York. Mereka memperingatkan, bahwa bumi ini sudah terlalu sarat didiami oleh manusia yang membawa dampak yang akan merugikan bagi kelanjutan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga kesemuanya harus segera ditata (kembali), dibentuk (kembali), dan dibenahi (kembali) dengan kerja keras sebab jika terlambat dikhawatirkan pertambahan penduduk ini akan menimbulkan ketidak seimbangan yang berkepanjangan. Peringatan lain, menurut para cendekiawan tadi, kemusnahan planet bumi ini sudah diambang mata, yaitu diperkirakan tidak akan sampai 100 tahun lagi sejak tahun 1975, artinya sejak tahun 2000 ini planet bumi akan semakin rusak yang ditandai dengan datangnya angin topan, hujan badai, banjir, kelaparan, bangkitnya wabah penyakit silih berganti yang berkepanjangan, memusnahkan semua harta benda dan atau segala-galanya.

Umat manusia rupanya alpa atas peringatan ini dan boleh jadi Allah SWT tengah menegur umatNya. Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar". (Q.S. Ar Ruum, 41).

Kekhawatiran ini, jauh-jauh sebelumnya telah diperingatkan antara lain oleh Thomas Robert Malthus (1766) dalam bukunya " Essay on the principles of population" (1798) ia berpendapat bahwa masyarakat manusia akan tetap miskin karena ada kecenderungan pelipatan jumlah penduduk dalam setiap 25 tahun sekali sedangkan peningkatan sarana-sarana kehidupan berjalan lebih lambat. Ia menyarankan agar ibu-ibu " Menjarangkan kehamilan/pembatasan kelahiran/birth control/gerakan keluarga berencana" atau dengan sebutan lain supaya jumlah penduduk di bumi ini tidak bertambah dengan cepat.

Dimaklumi pula, bahwa pelopor gerakan "birth control" atau " pembatasan kelahiran" itu baru muncul dan memperoleh perhatian dari kaum perempuan pada perempatan kedua abad ke-19. Di Inggris Marie Stopes, (1880) merintis gerakan ini, di Amerika Serikat Margareth Sanger, (1883), dan di India oleh Lady Rama Ran, (1948).

Para perintis ini baik di Benua Eropa, Inggris dan Amerika akhirnya membentuk International Planned Parenthood Federation (IPPF) perkumpulan keluarga berencana swasta di seluruh dunia pada tahun 1952 dan Indonesia telah menjadi anggotanya. Baru pada tahun 1970 Pemerintah Penduduk Indonesia (yang jumlah penduduknya sudah berjumlah 120 juta jiwa), membentuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang KB secara nasional dengan sebutan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN.



Bangsa dan negara Indonesia menyadari benar, bahwa salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat yang maju dan sejahtera itu tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan dibidang kependudukan khususnya pengendalian di bidang laju pertumbuhan penduduk, penambahan jumlah penduduk, migrasi dan lebih khusus lagi terkait dalam Program Keluarga Berencana Nasional yang turut serta membangun masyarakat maju dengan cara "...pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana". (GBHN 1999-2004).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 dan pada tanggal 29 Juni 2000 telah genap berusia tiga puluh tahun (1970-2000) atau tiga dasawarsa, suatu usia yang cukup dewasa bagi suatu gerakan dan telah memperlihatkan keberhasilan. Jika pada permulaan gerakan tahun 1969/1970. Pasangan Usia Subur (PUS) berhasil menjadi peserta Gerakan Keluarga Berencana (KB), baru berjumlah 53 ribu peserta KB maka pada tahun 2000/2001 telah mencapai 27 juta peserta KB.

Walaupun sejarah perkembangan gerakan KB ini dimulai dengan mempergunakan paradigma yang lama (seperti dewasa ini, sebagian kecil di beberapa daerah masih mempergunakannya) yaitu mengupayakan gerakan KB ini hanya sebatas alat pembangunan ekonomi, berorientasi hanya kepada target sebatas pencapaian kuantitatif demografis, sebatas

penyuluhan mobilitas massa dengan sasaran utama hanya kaum perempuan saja; telah menimbulkan banyak reaksi para pakar kependudukan untuk merubah paradigma yang lama itu dengan paradigma yang baru.

Rekomendasi untuk melaksanakan paradigma baru yang berisi desakan agar supaya pelayanan KB itu senantiasa harus merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan reproduksi ketimbang hanya mengejar target demografis, tercetus pada Konprensi Kependudukan Dunia di Buchares Rumania tahun 1974. Kemudian muncul kembali rekomendasi yang sama pada Internasional Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo yang berisi mendesak negara-negara di seluruh dunia tentang perlunya diberlakukan reorientasi dan reposisi pelaksanaan KB yang menitikberatkan kepada keharusan untuk menghargai dan melindungi hak-hak reproduksi yang menjadi bagian integrasi dari pelaksanaan Hak Azasi Manusia secara universal. Bahkan pada Beijing Platform for Action tahun 1995 di Beijing Cina, mendesak agar pelaksanaan KB itu menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan kaum perempuan.

Pada intinya paradigma baru itu diupayakan untuk pelaksanaan KB ini bergerak dalam bidang : (a) pembangunan kualitas penduduk yang beranjak dari problema keluarga; (b) menghargai dan melindungi hak kesehatan dan reproduksi tanpa harus mengabaikan misi untuk



menurunkan fertilitas; (c) sudah pada waktunya sasaran KB adalah juga kaum pria; (d) berbasis pada kebutuhan dan permintaan masyarakat dan (e) aktivitas program difokuskan kepada konseling, partisipasi, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian keluarga dan masyarakat.

Dengan paradigma yang baru itu kepada akseptor diberikan hak konsumen sebagai berikut :

Adanya 1) hak informasi yang bertujuan untuk mengetahui segala manfaat dan keterbatasan pilihan metode KB; 2) hak akses untuk memperoleh pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, status perkawinan dan tempat tinggal; 3) hak pilihan untuk memutuskan secara bebas dalam memilih dan menerapkan metode KB yang akan digunakan; 4) hak keamanan untuk memperoleh pelayanan yang aman dan efektif; 5) hak privasi yakni mendapatkan privasi dalam konseling dan pelayanan KB; 6) hak kerahasiaan klien mendapatkan jaminan informasi pribadi yang diberikan akan dirahasiakan; 7) hak harkat untuk mendapatkan pelayanan secara manusiawi, penuh penghargaan dan perhatian; 8) hak kenyamanan, agar memperoleh pelayanan dan kenyamanan; 9) hak berpendapat untuk menyatakan secara bebas terhadap pelayanan yang ditawarkan; 10) hak keberlangsungan yaitu supaya mendapatkan jaminan ketersediaan metode KB secara lengkap dan pelayanan berkesinambungan; 11) hak ganti rugi untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak klien. Perkumpulan KB Indonesia Yogyakarta 2000 dalam Pikiran Rakyat (18 Mei 1999).

Berkaitan dengan hak konsumen itu pada hakekatnya resiko medis, efek samping dan efektivitas setiap metode KB untuk melindungi dari kehamilan merupakan informasi penting yang perlu dipertimbangkan bagi pasangan dalam memilih metode kontrasepsi. Semakin banyak Informasi metode kontrasepsi yang dimiliki perempuan dan laki-laki, mereka akan

semakin mampu memutuskan metode kontrasepsi yang dipilih. Kebanyakan metode kontrasepsi akan efektif dan aman bagi sebagian besar klien KB bila digunakan dengan benar dan konsisten.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, khususnya bagi permasalahan kependudukan, seharusnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia harus jauh-jauh melaksanakan paradigma baru itu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang intensif agar tercapai keluarga sakinah, mawadah, warrohmah yang dapat memberikan makna bagi isteri atau suami "Nafsun toyyibun wa robbun ghaffur", dapat memberikan makna bagi keluarganya, "Akhlun toyyibun wa robbun ghaffur", dapat memberikan makna bagi masyarakatnya, "Qoryatun toyyibun wa robbun ghaffur" dan memberikan makna bagi bangsa dan negaranya, "Baladatun toyyibun wa robbun ghaffur" (Melly S.S. Rifa'i 1996).

2. Program-program untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, "adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peranserta masyarakat". Jika mengacu kepada batasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1998) upaya meningkatkan kesejahteraan ini mengandung arti sebagai "proses" yaitu semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha

pemerintah setempat, guna meningkatkan kondisi masyarakat. Proses ini melibatkan dua unsur yaitu "partisipasi masyarakat" itu sendiri dalam meningkatkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya dan "pembentukan pelayanan teknis" dan bentuk-bentuk pelayanan yang mendorong timbulnya inisiatif sifat berswadaya dan kegotong royongan yang membuat kesemuanya lebih efektif. Arti berikutnya sebagai "metode" pembangunan masyarakat yang lebih menekankan kepada "partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan" dan pada tingkat tertentu "pembangunan masyarakat dapat diartikan suatu gerakan".

Dari uraian tersebut di atas program atau gerakan yang berarti proses dan metode mensejahterakan masyarakat ini akan mengacu kepada :

- a. Gerakan KB Nasional yang bersumber pada Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, secara substansial masih tetap relevan dengan visi Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Dan visi ini pada saat krisis ekonomi berkepanjangan seperti sekarang, justru memperoleh momentum yang strategis karena secara mikro keluarga kecil dapat meringankan beban tanggung jawab keluarga yang berat, sedangkan secara makro jumlah keluarga kecil memberi peluang lebih besar bagi keluarga untuk ikut membangun generasi yang lebih potensial dan berkualitas.

Oleh karena itu dapat dipahami, bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional untuk tahun 2000-2002 ini masih dikonsentrasikan pada misi :

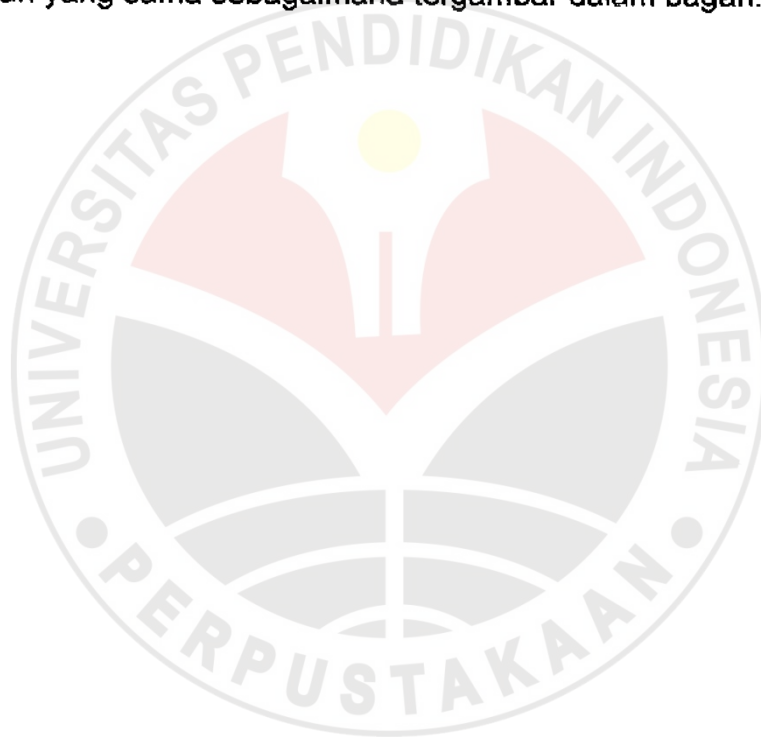
- 1) meningkatkan pelayanan dan kesehatan reproduksi;
- 2) meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi KB kepada keluarga-keluarga akseptor, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan keluarga;
- 3) meningkatkan promosi dan perlindungan tentang hak-hak reproduksi;
- 4) meningkatkan kedudukan dan peranserta perempuan dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 5) meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui pendekatan siklus keluarga;
- 6) meningkatkan peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.

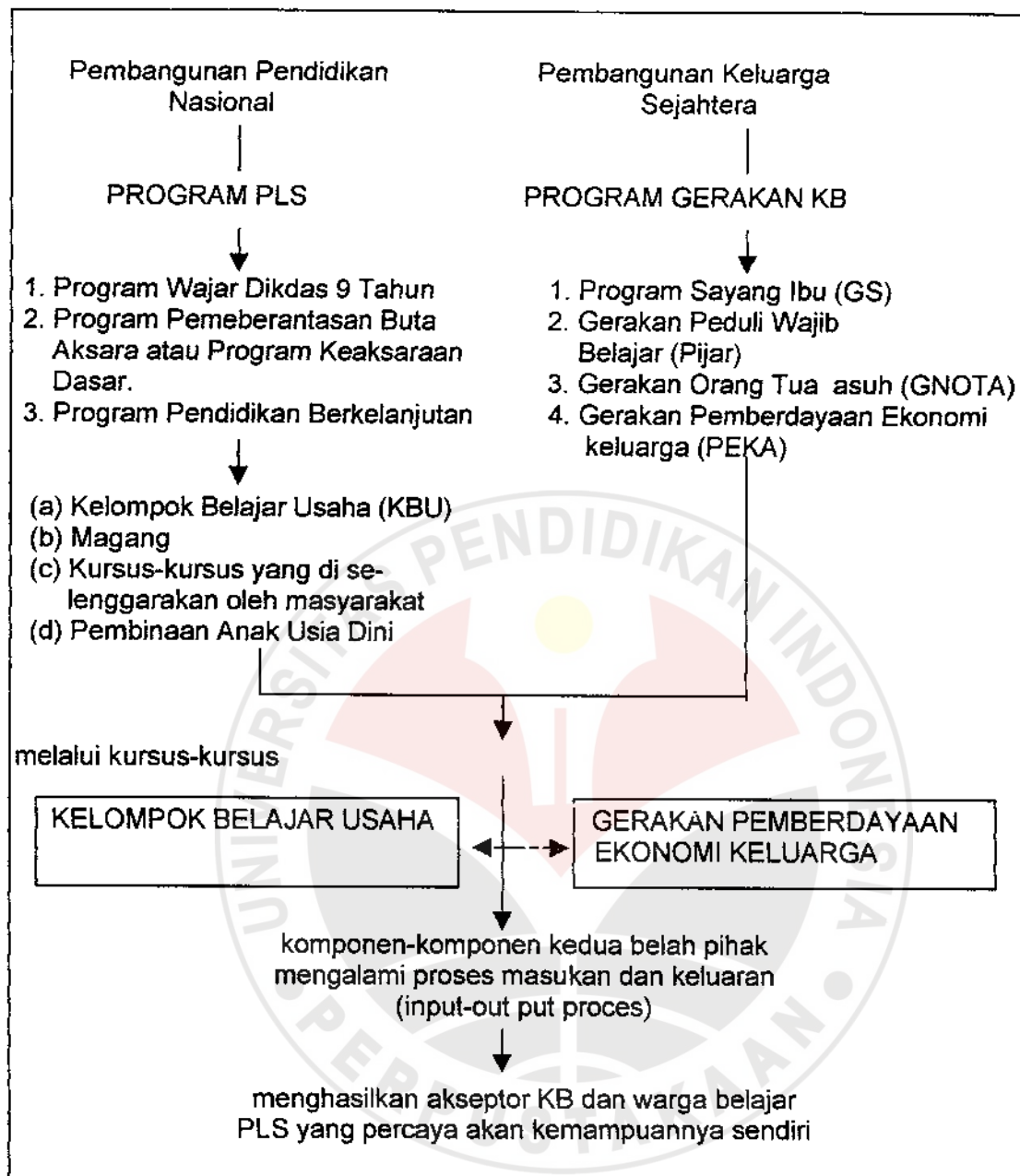
Di lapangan gerakan KB Nasional ini melaksanakan Program Sayang Ibu; Gerakan Peduli Wajib Belajar, Gerakan Orang Tua Asuh, dan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

- b. Gerakan Pendidikan Nasional (Pendidikan Luar Sekolah) yang bersumber pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah yang pada dasarnya bertujuan untuk : "Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya" (Pasal 2) yang secara operasional program-program Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari 1) Program Wajar Dikdas 9 Tahun; 2) Program Pemberantasan Buta Aksara atau Program

Keaksaraan Dasar dan 3) Program Pendidikan Berkelanjutan yang terdiri dari kelompok Belajar Usaha/Kelompok Bidang Usaha (KBU), magang, kursus-kursus, kepramukaan, pelatihan dan pembinaan anak usia dini.

Di lapangan, program upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat itu “seakan-akan menyatu” antara gerakan KB dan gerakan PLS (keterkaitan dan kesepadanan atau link and match) karena keduanya memiliki tujuan yang sama sebagaimana tergambar dalam bagan.





BAGAN 1
KETERKAITAN-KESEPADANAN ANTARA PLS DAN KB

Penjelasan dan pengertian istilah :

“Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEKA-KB)”, merupakan suatu upaya untuk menjadikan keluarga khususnya ibu-ibu akseptor sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang dapat mengembangkan dan meningkatkan motivasi, pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya di bidang kegiatan ekonomi produksi (BKKBN 2000).

“Kelompok Belajar Usaha (KBU-PLS)”, merupakan suatu upaya agar warga belajar yang belum mempunyai mata pencaharian yang layak, supaya mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya; suatu upaya agar masyarakat yang berpenghasilan ekonomi rendah, mampu meningkatkan sumber mata pencahariannya” (Pendidikan Masyarakat 2000).

Penelitian Direktorat Pendidikan Masyarakat pada tahun 1981 terhadap 18 Kelompok Belajar Usaha (KBU) di Propinsi Sumatra Utara, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, menurut (Sudjana H.D 1993), telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan pemberdayaan di bidang sektor ekonomi kerakyatan dalam hal : 1) meningkatkan mutu kehidupan yang meliputi : kegiatan berkelompok, menabung, berusaha, kebebasan mengemukakan pendapat, mencatat peristiwa, pandangan terhadap kehidupan dimasa depan, partisipasi dalam pembangunan, pengelolaan, mengemukakan gagasan dan kebanggaan terhadap kedudukan sebagai warga belajar. 2) tingkat/taraf kehidupan yang meliputi : penghasilan, mutu produksi, pengadaan dan pengembangan modal usaha, bahan dan alat

produksi, keuntungan, cadangan usaha, dana belajar berputar, pemasaran dan biaya produksi.

Kedua unsur tadi diukur sebelum dan sesudah warga belajar mengikuti kegiatan KBU-PLS dengan hasil adanya kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri.

B. Perumusan Masalah

Penelitian dengan pendekatan secara naturalistik-kualitatif ini menurut (Bogdan dan Bilken, 1982; Miles & Michael, 1985; Lincoln & Guba, 1985; Nasution, 1988; Subino, 1982), akan membawa latar belakang masalah penelitian kepada suatu lapangan pengkajian, fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pengkajian pada Pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Mandiri melalui Pendidikan Luar Sekolah di Kota Bandung yang terfokus kepada :
 - a. Keberadaan Gerakan Keluarga Berencana Mandiri;
 - b. Kebermaknaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Gerakan Keluarga Berencana Mandiri dan
 - c. Pemberdayaan Gerakan Keluarga Berencana Mandiri.

Fokus-fokus tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang: bagaimanakah harapan dan sikap akseptor dan warga belajar dengan kehadiran atau keberadaan gerakan keluarga berencana, kemudian apakah akseptor dan warga belajar dengan kesadarannya sendiri memaknai, atau memberi makna dan menyadari adanya nilai guna,

nilai manfaat bagi diri dan pengembangan KB dan bagaimanakah pemberdayaan program peningkatan pengetahuan, dan keterampilan akseptor dan warga belajar melalui program Pendidikan Luar Sekolah.

2. Pengkajian tentang manfaat kerjasama dari kedua belah pihak program KB dan program PLS dalam satu wadah "keterkaitan dan kesepadanan atau link and match" atau program PEKA-KB (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga-KB) dan program KBU-PLS (Kelompok Belajar Usaha-PLS) yang terfokus kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
3. Pengkajian dalam pemberdayaan gerakan KB kepada generasi penerus yang dianjurkan memakai konsep keluarga kecil, bahagia dan sejahtera untuk tahun 2005.

Seluruh perumusan masalah atau fokus penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya promovendus tuangkan ke dalam judul **"KEBERMAKNAAN GERAKAN KELUARGA BERENCANA MANDIRI"** (Studi mengenai Pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Mandiri melalui Pendidikan Luar Sekolah di Kota Bandung).

Secara operasional kata-kata yang terkandung dalam judul ini merupakan acuan untuk memperjelas dan menghindarkan kesalah pahaman seperti :

"Kebermaknaan", adalah hal kepemilikan makna, arti, atau maksud. Kebermaknaan, bermakna, memaknai, dapat diartikan sebagai "pemahaman" kita terhadap sesuatu (benda, peristiwa, perbuatan) menurut artinya sejauh yang dapat dikira, teraba dari isyarat-isyarat yang dikomunikasikan orang mengenai sesuatu

kejadian atau hal berikut konteks atau lingkungannya yang bersangkutan (Sanusi A. 1989);

"Gerakan Keluarga Berencana Mandiri", adalah suatu tahapan program KB, tahapan pelembagaan dan pembudayaan yang pada hakekatnya adalah ingin mewujudkan suatu keadaan atau sikap mental dimana dalam melaksanakan KB masyarakat telah mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada pihak atau orang lain, tidak ada unsur paksaan dan mau menyediakan biaya sendiri untuk keperluan alat kontrasepsi untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera atau NKKBS (BKKBN, 1989);

"Pendidikan Luar Sekolah", bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar persekolahan, baik di lembaga maupun tidak yang meliputi pendidikan di dalam keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Alur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan,.... (Undang-Undang RI No:2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah);

"Kota Bandung", sebagai ibu kota Pemerintah Propinsi Jawa Barat, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan penelitian, kota niaga, perdagangan, dan industri, pariwisata, seni dan budaya, yang dijadikan obyek atau situs penelitian. (Diparda, 1990).

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan atau fokus dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang perkembangan Gerakan Keluarga Berencana di Kota Bandung dengan aspek-aspek keberadaannya, kebermaknaannya dan nilai-nilai yang terkandung dan pemberdayaannya akseptor warga belajar dan kelompok lanjut usia dan generasi penerus melalui gerakan dan program-program

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang terpadu dengan program KB. Tujuan penelitian lainnya, ialah untuk melengkapi hal-hal baru yang berkaitan dengan keilmuan dan penelitian Pendidikan Luar Sekolah di satu pihak dan di pihak lainnya, mencoba untuk menemukan dan menerapkan metoda pengabdian-pelayanan atau Extension Education melalui program keterkaitan-kesepadanan atau link and match terhadap masyarakat atau khususnya kepada para akseptor dan warga belajar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menitik beratkan kepada pendekatan terhadap pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Mandiri di Kota Bandung melalui Pendidikan Luar Sekolah dengan menggunakan metoda naturalistik kualitatif agar supaya dapat mengungkapkan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para pakar sebelumnya dan mencocokkannya di lapangan. Harapan lain dari kegunaan penelitian ini promovendus berusaha untuk menemukan hal-hal baru cara-cara baru dalam program perluasan, pengkayaan dan peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada umumnya.

Kegunaan lain, keterlibatan penulis sebagai instrumen penelitian ketika terjun di lapangan akan memberikan pengalaman yang berharga, pemahaman dan kesan-kesan tersendiri bagi penulis dari pada hanya penjelasan dari orang lain.



Disisi lain, kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan keluarga, bangsa, negara dan kaum ilmuwan yang diharapkan akan menambah, mengembangkan, menemukan wawasan (pandangan, gagasan), wacana (teori), dan wahana (metoda) yang baru dan pengalaman yang lebih luas dan lebih mendalam untuk disebar luaskan tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Gerakan Keluarga Berencana Mandiri dan Pembangunan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Luar Sekolah.

Mengacu kepada kegunaan penelitian ini pada garis besarnya untuk mengetahui bagaimana pendekatan-pendekatan secara analisis-kualitatif terhadap pengembangan gerakan KB itu, bagaimana makna dan nilai bagi akseptor KB dan warga belajar PLS serta kaum lanjut usia dan terakhir bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia dan menanamkan norma-norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera terhadap generasi penerus yang ber KB tahun 2005.

E. Asumsi-Asumsi

Sebagai titik tolak dari penelitian ini diajukan asumsi-asumsi pokok, sebagai berikut :

1. Bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan yang pokok bagi pengembangan dan mempertahankan keberadaan atau eksistensi manusia. Tanpa belajar manusia akan mengalami kesulitan baik dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungannya maupun dalam memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan yang selalu berubah. Keharusan belajar sudah disepakati para pakar dengan munculnya teori-teori pembelajaran namun jauh sebelumnya diakui pula, bahwa Islam adalah agama pertama yang merekomendasikan keharusan belajar seumur hidupnya. Rasulullah, Muhammad S.A.W. memotivasi umatnya dalam hadits: "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Tuntutlah ilmu sejak buaian sampai liang kubur. Tiada amalan umat yang lebih utama dari pada belajar", (Sudjana HD., 1993 : 41). Juga Konferensi Pendidikan Internasional di Amman dengan tema "Education For All" atau "Pendidikan Untuk Semua", sependapat dengan rekomendasi dalam Agama Islam, bahwa hanya mereka yang berpendidikan atau belajar saja yang mampu berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Dalam Amman Affirmation (1996) itu menyebutkan: "Education is empowerment...the right to education is nothing less than the right to participate in the life the modern world". (Soeddiarto, 1997). Oleh karena itu, dalam pendidikan untuk semua ini semua warga negara Indonesia harus memperoleh pendidikan dasar, baik lelaki, wanita, anak, pemuda perlu memperoleh pendidikan untuk dapat menjamin kesinambungan pembangunan dan orang dewasa perlu berpendidikan agar mereka dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Keberhasilan pendidikan untuk semua ini pada tahun 2000 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan sekolah. pada

tahun 1999/2000 angka partisipasi murni untuk Sekolah Dasar mencapai 25.69 juta orang (95,0%), SLTP mencapai 7,6 juta orang (59,9%) dan SMU/SMK mencapai 4,77 juta orang. Menurunnya angka buta huruf merupakan pertanda adanya kemajuan sumber daya manusianya. Pada tahun 1971 masih mencapai jumlah sebesar 31,5 juta orang tahun 1980 sebesar 30,1 juta orang, pada tahun 1990 sebesar 21,5 juta orang dan tahun 1998/1999 angka buta huruf itu semakin mengecil menjadi 11,84 juta orang (Biro Pusat Statistik, 1999). Demikian juga di bidang Pendidikan Luar Sekolah untuk orang dewasa atau Continuing Education menunjukkan kenaikan dalam jumlah Kursus-Kursus, Pendidikan Mata Pencaharian dan Pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia.

2. Bahwa kinerja BKKBN atau upaya-upaya Gerakan Keluarga Berencana Nasional telah berpengaruh dan mempunyai dampak positif terhadap unsur-unsur kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera antara lain berupa :
 - a) Kelahiran tercegah;
 - b) Penurunan tingkat fertilitas;
 - c) Peningkatan rata-rata harapan hidup;
 - d) Penurunan tingkat mortalitas;
 - e) Laju pertumbuhan penduduk dan
 - f) Peningkatan usia kawin.

3. Untuk lebih memahami tentang hal gerakan KB ini diasumsikan pula bahwa : **Pertama**, Keberadaan gerakan KB berarti suatu “keadaan” yang aktual, yang terjadi dalam ruang dan waktu atau menunjukkan kepada “suatu benda yang ada di sini dan sekarang”, (Titus H. dkk, alih bahasa oleh Rasjidi H.M., 1984). Dengan kata lain, suatu keberadaan, suatu keadaan, atau sesuatu yang ada, dalam hal ini BKKBN atau Gerakan Keluarga Berencana Mandiri akan tetap ada tetap eksis, menurut Siagian S.P, (1985) jika KB dapat melaksanakan fungsi fungsi manajemennya dan Hamijoyo S., (1992), sependapat, bahwa keberadaan BKKBN akan berdaya guna apabila dapat menjalankan fungsinya, yaitu : sebagai penggerak; pelaksana program; memiliki metoda dan strategi untuk mencapai sasaran dan memiliki proses yang kontinu dalam alur mengaktualisasikan nilai sosial budaya yang dihayati dengan penuh kesadaran; kesukarelaan dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu para pengguna KB atau akseptor.
- Kedua**, kebermaknaan dan nilai gerakan KB, Sanusi, A. (1989), menjelaskan, pengertian makna, kebermaknaan, bermakna, memaknai, meaning (Bahasa Inggris), yaitu:

“... selama dan sampai kini, makna atau kebermaknaan dari sesuatu itu, adalah pemaknaan kita terhadap sesuatu itu tentunya menurut artinya sejauh yang dapat dikira teraba dari isyarat-isyarat yang dikomunikasikan orang mengenai sesuatu kejadian atau hal berikut konteks atau lingkungannya yang bersangkutan”.

Dengan demikian, bahwa makna yang dilihat oleh seseorang itu, dan dihadapkannya, akan terjadi dengan daya dan kemampuan mengolah secara indrawi, nalar dan hati nurani yang kemudian makna itu dirumuskan dan dijabarkan, dikomunikasikan dengan berbagai bahasa dan diterjemahkan keberbagai perbuatan-perbuatan. Sedangkan nilai-nilai yang terkandungnya ialah nilai-nilai yang berkaitan dengan kelangsungan ber KB berupa : persepsi, afeksi dan psikomotor. Makna dan nilai ini sesungguhnya merupakan "profil", "wajah", "performa" atau "gambaran" dari pada keadaan akseptor KB yang sebenarnya dan dari padanya kemudian "diangkat" makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk dimaknai dan diamalkannya.

Ketiga, usaha memberdayakan akseptor KB dan warga belajar PLS, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan untuk berperan serta secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, masyarakat dan bahkan negaranya. Pendekatan yang diberlakukan ialah dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) yaitu akseptor KB menjalani pendidikan keterampilan dan latihan dalam program Pendidikan Masyarakat atau Pendidikan Luar Sekolah dalam waktu tertentu dengan harapan para lulusan mampu menyebar luaskan ke pelbagai lapisan di masyarakat tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Gerakan Keluarga Berencana Mandiri dan Pendidikan Luar Sekolah.

F. Metode Penelitian

Metoda penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif. Sebagaimana diungkapkan oleh (Moleong, M.J. 1983; Lincoln & Guba 1985; dan William D. 1988) menyebutnya "naturalistic inquiry" (try to get information), artinya penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami atau "natural setting" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nasution, S., (1988) mengartikan penelitian deskriptif "adalah penelitian yang mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Metode ini dipandang tepat untuk Gerakan Keluarga Berencana Mandiri di Jawa Barat, karena masalah yang diteliti memerlukan pengungkapan deskriptif secara komprehensif dan mendalam berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung dalam mengantisipasi program-program KB.

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti, sebagai instrumen, sebagaimana dikehendaki dalam metoda deskriptif atau metoda kualitatif itu akan melakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi. Secara langsung observasi akan dilakukan peneliti pada situs atau obyek penelitian yang sekiranya memiliki makna, arti atau memiliki nilai-nilai tertentu;

2. Partisipasi. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri dalam suatu proses kegiatan tertentu yang dilakukan oleh akseptor atau warga belajar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan partisipasi pasif dan tergantung situasi dan kondisi setempat juga dilakukan partisipasi aktif;
3. Studi dokumentasi; Semua dokumentasi yang ditemukan dipelajari, baik berupa tulisan, gambar, photo, rekaman, yang berkaitan dengan jenis dukungan terhadap pemaknaan data yang diperoleh. Sumber lainnya berupa dokumen rapat dinas, rapat kordinasi, rapat tahunan, laporan-laporan dan lainnya sebagai bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data;
4. Wawancara; dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dari hasil observasi dan partisipasi serta melakukan pencatatan secara langsung terhadap subjek penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan;
5. Penyebaran angket; angket terbuka dilakukan untuk memperoleh gambaran atau profil subyek penelitian atau akseptor KB dan warga belajar PLS dan
6. Mempelajari kembali data yang telah diklasifikasi kemudian membuat kesimpulan-kesimpulannya;
7. Perifikasi, triangulasi dan pemeriksaan ulang di lapangan dilakukan untuk memperoleh kepastian keadaan atau data yang terakhir dan
8. Penyusunan laporan dibuat untuk draft penulisan ilmiah sebagai pamungkas.

H. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Obyek atau situs penelitian yang dapat memberikan informasi-informasi mutakhir tentang Gerakan Keluarga Berencana Mandiri adalah para peserta atau akseptor Keluarga Berencana (KB) Mandiri yang aktif dan kelompok lanjut usia yang pernah ber-KB. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi, adalah tempat peserta KB dan warga belajar PLS serta para lanjut usia di Kota Bandung yang berdomisili di enam wilayah : Wilayah Cibeunying; Bojonegara; Tegallega; Karees; Ujungberung dan Gedebage dengan populasi (N) sebanyak 40.897 peserta KB aktif dan sampel sebanyak (S) 381 peserta KB aktif dan beberapa keluarga untuk studi kasus yang tersebar di kelurahan-kelurahan pada enam wilayah tersebut .

Penelitian lapangan dan penyusunan akhir/draft penelitian ini dilakukan sejak tahun 1999 secara bertahap dan bersinambungan sampai dengan tahun 2001 untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang terakhir. Sementara itu bimbingan dilakukan dengan promotor dan ko-promotor untuk memperoleh petunjuk dan saran-sarannya demikian juga dengan kelompok-studi dilakukan tukar pikiran dan diskusi untuk memperoleh kesamaan pandangan.